www.parlemen.net

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2007—2008

SENIN, 12 MEI 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2008

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2007 - 2008

SENIN, 12 MEI 2008

Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang kami hormati para Wakil Ketua,
Yang kami hormati para Anggota Dewan,
Sidang Dewan yang terhormat,

Hari ini, Dewan membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 18 Juli 2008 yang akan datang, meliputi 49 hari kerja atau 68 hari kalender. Kegiatan terfokus kepada 3 (tiga) fungsi utama Dewan dengan penekanan kepada pelaksanaan fungsi legislasi, yang akan dilaksanakan oleh Alat-Alat Kelengkapan Dewan.

Dari catatan Sekretariat Jenderal, sejumlah ..... Anggota Dewan telah menandatangani daftar hadir dari semua Fraksi yang ada di lembaga ini. Dengan mengucap *Bismillahirahmanirrahim,* izinkanlah kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Paripuma ini kami nyatakan terbuka untuk umum.

Sidang Dewan yang terhormat

Memasuki Masa Persidangan IV, melalui mimbar ini Pimpinan Dewan mengucapkan “Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus" dan merayakan "Hari Pantekosta" bagi anggota Dewan yang merayakannya dan umat Kristiani di seluruh Indonesia, yang berlangsung tanggal 1 Mei 2008 lalu. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan hidayahNya dan kekuatan lahir bathin dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara.

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net

Beberapa waktu lalu, menjelang pembukaan masa sidang, Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat masuk yaitu surat dari Presiden RI tentang penyampaian RUU tentang Meterologi dan Geofisika, RUU tentang Rumah Sakit, dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Pimpinan Dewan juga telah menerima usul Interpelasi Anggota Dewan tentang Kenaikan Harga-harga Kebutuhan Pokok, yang telah ditandatangani oleh 75 Anggota Dewan. Surat-surat masuk tersebut akan diproses sesuai mekanisme Dewan. Dengan masuknya 3 RUU ini akan menambah jumlah RUU yang akan dibahas oleh Dewan dalam tahun sidang ini, selain akan melanjutkan pembahasan terhadap 71 RUU yang saat ini sudah memasuki pembicaraan tingkat I. Pada Masa Sidang IV ini, di antara 71 RUU ada di antaranya yang dapat dipastikan memasuki pembahasan tingkat II/ Pengambilan Keputusan sehingga akan melengkapi 104 RUU yang telah diselesaikan DPR, dari target rencana 284 RUU yang telah ditetapkan oleh Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Di antara 71 RUU tersebut, yaitu RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu menjadi prioritas utama dalam penyelesaiannya mengingat Pemilu Presiden akan diselenggarakan pada tahun 2009. Masih dalam kaitan RUU bidang politik, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan RUU tentang Kementerian Negara juga perlu ditargetkan penyelesaiannya dalam masa sidang ini.

Terhadap RUU Pemilu Legislatif yang telah disahkan menjadi UU No. 10 Tahun 2008, DPD RI dan beberapa partai kecil telah mengajukan Pengujian *(Judicial Review)* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pimpinan Dewan berharap agar *Judicial Review* ini tidak akan mengganggu pentahapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009. Kalangan Dewan juga berharap agar keputusan MK diberikan sesuai kewenangannya dan hanya kepada materi-materi yang dimintakan pemohon, agar tidak terjadi putusan yang *ultra petita.*

Untuk menyelesaikan 71 RUU yang telah memasuki pembahasan tingkat I dan 23 RUU lagi yang masih dalam penyempurnaan, diperlukan peran aktif para anggota Dewan dan komisi-komisi atau pansus-pansus yang menanganinya, mengingat terbatasnya alokasi waktu yang tersedia, efektifitas pelaksanaan tugas-tugas legislatif mungkin hanya tinggal sekitar 10 bulan lagi. Itu pun masih akan dikurangi masa-masa reses.

RUU di bidang politik lainnya yang perlu segera diselesaikan antara lain: RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1998 tentang Mahkamah Agung; RUU tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi; dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; RUU tentang Wilayah Negara; RUU tentang Rahasia Negara; RUU tentang Pelayanan Publik; dan RUU-RUU pemekaran wilayah Kabupaten/Kota yang berjumlah 27. Di bidang Ekkuindagbang, antara lain: dua RUU Perubahan UU tentang perpajakan; RUU tentang Perbankan Syariah; RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. Di bidang Kesra antara lain: RUU tentang Pornografi; RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

RUU yang telah diselesaikan Dewan dalam masa persidangan yang lalu, yang memiliki nilai fenomenal dan telah disetujui secara aklamasi adalah UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini mewajibkan Pemerintah, Badan

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha Iainnya yang dimiliki oleh negara untuk menyediakan informasi publik. Dengan UU ini, dimaksudkan agar dapat menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana dan program pembuatan kebijakan publik, proses pengambilan dan alasan pengambilan keputusan. UU ini bertujuan, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada pelaksanaan fungsi Anggaran, komisi-komisi Dewan dan Panitia Anggaran bersama Pemerintah akan melakukan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2009, melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2006 dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN-P 2008. Selain itu BPK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun Anggaran 2007 dan Laporan Hasil Pemeriksaan periode I Juli sampai dengan 31 Desember 2007 kepada DPR. Dewan akan segera memanfaatkan laporan BPK tersebut untuk melakukan fungsi hak budget sekaligus fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Dalam rangka pengawasan, Badan Musyawarah DPR RI telah menyetujui usulan pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Usulan ini masih akan dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi DPR.

Dewan juga akan memproses tentang Penggunaan Hak Pemyataan Pendapat DPR terhadap penyelesaian kasus KLBI dan BLBI; dan memproses Usulan Anggota Dewan tentang Penggunaan Hak Angket terhadap penyelesaian kasus yang sama. Terkait dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sejumlah Anggota Dewan telah mengajukan usul interpelasi. Usul interpelasi ini dipicu oleh terjadinya krisis ketersediaan komiditi kebutuhan pokok meliputi gula, beras, minyak goreng, minyak tanah dan kedelai di pasaran yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Melambungnya harga-harga tersebut menimbulkan kepanikan masyarakat dan efek berganda pada berbagai aspek kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial baru, meningkatnya angka pengangguran dan kriminalitas yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Bulan-bulan terakhir ini, kita sangat prihatin dengan gejolak ekonomi dunia akibat melonjaknya harga minyak mentah. Dampak dari makin tingginya harga minyak dunia yang menyentuh sekitar angka 120 dolar AS per barel dan diprediksi akan terus naik, telah menjalar kepada harga komoditas sektor pangan dunia yang terus meningkat. Krisis pangan ini telah menjadi masalah global. Hal ini jelas membawa dampak kepada sektor keuangan yang akan mengalami kondisi yang sangat sulit. Pemerintah di kawasan Asia khususnya Asia Tenggara telah melakukan berbagai langkah. Indonesia, mau tidak mau juga harus melakukan perubahan APBN yang berjalan untuk merespons dinamika perubahan eksternal,

dengan berbagai strategi dalam pengamanan fiskal. Pemerintah terpaksa berupaya bongkar pasang APBN dengan memotong belanja seluruh departemen dan lembaga termasuk anggaran Dewan dan Sekretariat Jenderal DPR RI sebesar 10% mengubah berbagai asumsi makro-ekonomi, dan merevisi pertumbuhan.

Melalui pembahasan yang sangat intensif bersama pemerintah, Dewan menyetujui pengesahan APBN-P 2008, walaupun dengan beberapa catatan dari sejumlah Fraksi. APBN-P2008 menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 7,5 persen, kurs Rp. 9,100 per Dollar AS, patokan harga minyak 95 Dollar AS per barel dan *lifting* minyak 927 ribu barel per hari. Namun dengan terus bergejolaknya harga minyak dunia yang terus melejit, yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah perminyakan, jelas akan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap APBN 2008 yang sedang berjalan. Kenaikan harga minyak mentah membuka gagasan dari sementara kalangan DPR agar negara-negara Petrodollar yang memperoleh keuntungan besar dari meroketnya harga minyak dunia, seyogyanya dapat membantu negara-negara berkembang, terutama negara-negara muslim yang terkena imbas kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak ini juga disebabkan karena negara-negara Timur Tengah mengurangi produksi minyak mereka. Oleh karena itu, menyisihkan sebagian keuntungan untuk negara yang sangat memerlukan seperti Indonesia, perlu dipertimbangkan.

Baru-baru ini Presiden telah memberikan sinyal bahwa Pemerintah akan menaikan harga BBM yang besarannya masih akan dikonsultasikan dengan kalangan Dewan. Kebijakan Pemerintah ini merupakan imbas naiknya minyak mentah dunia yang akan menimbulkan kenaikan subsidi BBM sebesar Rp.240 triliun. Ini beban APBN yang sangat berat. Dewan berpendapat, kebijakan menaikkan BBM yang paralel dengan kenaikan harga minyak dunia, menandakan bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara eksportir minyak, tetapi telah menjadi negara importir minyak. Kebijakan pemerintah yang menyerukan penghematan konsumsi BBM, melalui program *smart card* mulai bulan September yang akan datang, jelas menggambarkan bahwa produksi minyak dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan. Dewan berpandangan, apabila produksi minyak dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan, maka sebenarnya Indonesia tidak perlu panik dengan kenaikan harga minyak dunia, walaupun tetap harus melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah mendahulukan upaya untuk menaikkan *lifting* minyak agar bisa mencapai 960 ribu barrel per hari. Alternatif lain seperti penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri berikut bunganya, menekan konsumsi BBM melalui penghematan, merealisasikan gerakan nasional yang nyata termasuk mendorong konversi minyak tanah ke gas elpiji, atau mengembangkan sumber energi baru dan kalau perlu memangkas kembali anggaran departemen-departemen dan menggalakkan pemberantasan korupsi. Selain itu, kalangan Dewan meminta Pemerintah untuk melakukan uji coba di lapangan terhadap program Bantuan Langsung Tunai plus (BLT +) **sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.**

Dewan mengingatkan, kenaikan harga BBM dapat menyebabkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat. Sekarang saja baru diwacanakan, harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai naik, nanti ketika harga BBM naik secara resmi, pasar kembali akan menaikkan harga, jadi untuk kenaikan harga BBM ini rakyat akan memikul beban dua kali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan kenaikan harga pangan dunia terutama beras, Indonesia tidak boleh serta merta mengambil keputusan menjadi negara pengekspor beras. Pemerintah harus lebih dahulu fokus kepada kebutuhan beras dalam negeri dengan memperkuat stok pangan nasional sebagai penyangga dan stabilisasi harga dalam upaya membantu masyarakat tidak mampu, dan ketersediaan beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bila saat musim paceklik.

Kenaikan harga pangan dunia terutama beras, jagung dan kedelai, pada saat ini dapat berkembang menjadi krisis yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, menciptakan kemiskinan terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini merupakan dampak dari laju jumlah penduduk di berbagai negara yang tidak seimbang dengan produksi pangannya, sementara itu lahan pertanian makin menciut. Oleh karena itu, Dewan menghimbau Pemerintah untuk mengantisipasi, mempersiapkan berbagai langkah kebijakan dalam menghadapi terjadinya krisis pangan. Dewan menekankan kepada Pemerintah, bahwa kebijakan ketahanan pangan tidak bisa lagi dilakukan dengan setengah hati. Bayang-bayang krisis pangan dunia yang menakutkan harus dijadikan peringatan yang serius. Kebijakan ketahanan pangan memang tidak boleh dipandang enteng, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemilu Legislatif akan berlangsung kurang dan satu tahun lagi. Pemilu sebagai salah satu agenda politik nasional merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskannya. Proses pentahapan pelaksanaan Pemilu harus benar-benar dilakukan secara tepat dan sistematis. Juga harus dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan ketentuan waktu dan aturan yang ditetapkan dalam UU Pemilu. Dewan menyadari tugas yang menjadi tanggung jawab KPU untuk melakukan pemutahiran data pemilih yang nantinya akan dipergunakan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah pekerjaan yang sangat memerlukan ketelitian dan keakuratan dalam penggunaan metode penilaian data. Hal ini juga berlaku pada saat KPU melaksanakan tugasnya pada tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu. Untuk itu, hal-hal yang berpotensi dapat menghambat kerja KPU harus segera diselesaikan, seperti masalah konflik intern parpol berkaitan dengan kepengurusan ganda.

KPU telah menetapkan bahwa masa kampanye dimulai pada awal Juli 2008 sampai dengan awal April 2009. Masyarakat berpendapat bahwa masa kampanye 9 bulan tersebut adalah waktu yang cukup lama yang dikhawatirkan dapat meningkatkan suhu politik nasional, dapat memunculkan berbagai gesekan yang bisa memicu konflik di tingkat akar rumput, terutama dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif seperti saat ini. Selain itu juga dapat mengganggu kinerja Pemerintah dalam menjalankan program-programnya terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kinerja Dewan dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusionalnya. Berkaitan dengan itu semua, Pimpinan Dewan berharap agar para anggota Dewan yang juga adalah anggota

partai politik tidak hanya fokus kepada kegiatan kampanye pemilu 2009, tetapi juga harus tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Anggota Dewan.

Dalam pada itu, pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah sepanjang tahun 2008, diharapkan tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan dan mencederai nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirnya calon perseorangan dalam Pilkada diharapkan dapat memberikan warna dan dinamika dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Satu hal yang menjadi keprihatinan adalah belum dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Propinsi Maluku Utara. Karena belum adanya pelantikan terhadap Gubernur/Wagub terpilih, ini jelas akan sangat merugikan bagi pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan demokrasi pada umumnya. Kasus Pilkada di Maluku Utara hendaknya menjadi pelajaran berharga khususnya bagi Pemerintah yang tidak konsisten dan cepat dalam mengambil keputusan.

Dilaksanakannya Pilkada di Jawa Barat dan Sumatera Utara dalam kondisi yang aman dan lancar, cukup melegakan. Namun demikian, masih perlu peningkatan akuntabilitas dan transparansi institusi-institusi yang terlibat Pilkada, dan perlu dorongan secara maksimal keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti pilkada, jangan sampai terjadi adanya pembengkakan golongan putih (golput) di masyarakat dalam pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, upaya untuk melakukan pencatatan warga yang akurat dalam daftar pemilih perlu terus ditingkatkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan perkembangan sejumlah masalah di bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, Dewan melihat adanya beberapa hal yang perlu dicermati dan mendapat perhatian kita bersama. Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu fokus perhatian Dewan. Pelaksanaan UN di lapar rr ih menemui berbagai permasalahan, baik yang bersifat substantif maupun teknis yang perlu mendapat penanganan dengan lebih baik, agar kegiatan yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit ini benar-benar dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana yang kita harapkan. Terlepas dari wacana mengenai urgensi UN sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan proses belajar mengajar di dunia pendidikan, Dewan sangat berharap agar pelaksanaan UN di masa-masa mendatang dapat dipersiapkan dengan Iebih baik, dihindari adanya kebocoran dan kecurangan yang berakibat kepada tindakan hukum baik kepada guru maupun kepada siswa, yang berakibat merusak citra dunia pendidikan.

Sementara itu, Dewan menyambut baik rencana Pemerintah untuk menganggarkan kenaikan dana alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SD dan SMP sederajat hingga dua kali lipat mulai tahun depan. Berita ini sangat menggembirakan. Dana BOS sudah sering menjadi pembahasan di kalangan Dewan. Peningkatan dana BOS ini untuk memenuhi kewajiban Pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, tetapi tetap berkualitas. Rencana ini harus didukung bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, Pimpinan Dewan meminta Komisi X untuk mengakomodir dalam pembahasan RAPBN 2009 dan pada saatnya mengawal realisasi kenaikan BOS ini.

Dewasa ini Pemerintah masih merumuskan Surat Keputusan Bersama (SKB) penghentian kegiatan Ahmadiyah. Tim Kecil dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama dan Kejaksaan Agung masih memerlukan waktu untuk mengkaji secara tepat rumusan yang akan dihasilkan, karena menyangkut hal yang sangat sensitif. Dewan mengharapkan, keluarya SKB ini tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, tidak memunculkan tindakan anarkisme kepada para pengikutnya, dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan keyakinannya, tetapi ajaran yang dianggap menyimpang perlu diluruskan. Oleh karena itu, kehati-hatian pemerintah perlu dipahami masyarakat luas. Dewan juga meminta masyarakat menyikapi masalah ini dengan jernih.

Dewan senantiasa mengikuti perkembangan virus flu burung yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Posisi Indonesia yang menempati peringkat pertama dalam kasus flu burung hendaknya dapat memacu Pemerintah untuk memaksimalkan semua upaya untuk mencegah dan menanggulangi penularan virus tersebut. Dalam kaitan ini, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Amerika mengenai material transfer agreement (MTA) dalam penanganan virus flu burung, perlu segera diperbaiki. Kalangan Dewan meminta agar masalah ini perlu dirundingkan juga oleh TNI Angkatan Laut. Kita juga meminta agar dilakukan transparan tentang kemana saja virus yang diteliti dikirim dan yang terpenting adalah kemudahan akses bagi Indonesia untuk mendapatkan vaksin jika virusnya berasal dari Indonesia. Kesepakatan tersebut-harus menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, Dewan dan masyarakat Indonesia merasakan bahwa narkoba sekarang ini telah menjadi masalah yang benar-benar serius dan menakutkan. Indonesia tidak hanya menjadi tempat transit bagi perdagangan narkoba, tetapi telah merambah pada produksi dan distribusi. Walaupun telah dilakukan penangkapan besar-besaran terhadap para bandar dan produsen tetapi penyelundupan benda haram ini dari luar negeri masih saja berlangsung. Penggunanya meningkat dari waktu ke waktu, sekarang ini diperkirakan sekitar 10 juta dari kalangan generasi muda. Setiap hari puluhan pengguna narkoba mati sia-sia. Oleh karena itu, eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah dapat segera dilaksanakan. Ada sekitar 44 terpidana mati warga negara asing dan warga negara Indonesia dan sekitar 20 orang dihukum seumur hidup. Kepada Kejaksaan Agung diminta segera berkoordinasi untuk pelaksanaan eksekusi ini.

Beberapa hari yang lalu, masyarakat kembali dibuat kecewa khususnya pengguna jalan tol menuju dan dari Bandara Soekarno-Hatta. Semua akses menuju Bandara lumpuh, baik yang melalui Tol Sedyatmo maupun jalan alternatif lain. Penyebabnya adalah jebolnya tanggul sepanjang 10 meter di kilometer 26 Tol Sedyatmo, diterjang air pasang. Air tergenang antara kilometer 25 sampai 27 dengan ketinggian lebih dari satu meter. Banjir di jalan tol ini adalah peristiwa ketiga dalam enam bulan terakhir. Hal ini mengakibatkan tertundanya sekitar 100 penerbangan, terdiri dari 87 penerbangan domestik dan 13 penebangan internasional. Agar kejadian ini tidak terulang kembali, perlu dibangun tanggul yang permanen. Sudah saatnya Pemerintah membangun moda transportasi alternatif menuju dan dan Bandara seperti jalan kereta api.

Sidang Dewan yang terhormat,

Beberapa hari yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa tragis dengan tewasnya 21 orang yang tertimbun tanah longsor di Tembaga Pura, Mimika, Papua, dan kemungkinan korban akan terus bertambah. Para korban adalah pendulang liar yang menghuni kamp tambang tradisional di daerah itu. Kejadian ini berawal saat hujan lebat dan mengguyur kawasan yang rawan longsor. Atas kejadian ini, Dewan menaruh keprihatinan yang sedalam-dalamnya dan mengharapkan kepada pemerintah daerah agar aktifitas penambangan tradisional di daerah rawan longsor dapat dihentikan dan meminta pemerintah daerah dan masyarakat sekitar untuk bekerja sama menangani para korban.

Dalam pada itu, kita juga menaruh keprihatinan akan terjadinya Topan Nargis di negara tetangga kita Myanmar yang menelan korban sekitar 80.000 orang. Korban terbesar adalah penduduk yang mendiami wilayah Irrawaddi dan sebagian tewas di Yangon. Bencana topan Nargis merupakan bencana yang terburuk sejak tahun 1991. Junta Myanmar telah mengetuk masyarakat internasional untuk membantu mengatasi bencana ini. Untuk itu, Dewan meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan terhadap bencana yang sangat besar ini.

Sidang Dewan yang terhormat

Situasi dunia dewasa ini masih ditandai oleh berbagai permasalahan, baik permasalahan politik dan keamanan maupun sosial dan ekonomi. Di beberapa kawasan, hingga saat ini kita masih saja menyaksikan konflik-konflik politik dan aksi-aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di kalangan masyarakat sipil, seperti yang terjadi di Irak dan dalam konflik Palestina-Israel. Terhadap konflik Palestina-Israel, Dewan tetap berpendapat bahwa penyelesaiannya harus dilakukan melalui jalan dialog dan melibatkan seluruh elemen bangsa Palestina. Terkait dengan hal ini, Dewan berharap Indonesia yang kini masih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk dapat lebih aktif lagi dalam menemukan solusi damai Palestina-Israel. Hal ini senafas dengan hasil perjuangan Indonesia di berbagai forum pertemuan internasional khususnya dalam *Assembly IPU* yang terakhir di Cape Town, Afrika Selatan.

Dewan juga berharap Indonesia perlu terus memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia-Pasifik, antara lain dengan turut membantu menemukan solusi damai atas permasalahan yang terjadi di Semenanjung Korea. Begitu juga di Asia Tenggara, Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi peranannya dalam mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai dan stabil. Sementara itu, terhadap persoalan yang terjadi di Myanmar, Dewan berharap Indonesia bersama dengan negara-negara Anggota ASEAN lainnya dapat mengambil sikap yang lebih tegas lagi terhadap junta militer Myanmar terkait dengan proses demokratisasi di negara tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam diplomasi keparlemenan, Delegasi DPR-RI telah menghadiri Sidang Assembly IPU ke-118 di Cape Town, Afrika Selatan. Delegasi DPR-RI telah berperan aktif selama mengikuti Sidang Assembly IPU tersebut, baik dalam pembahasan di sidang-sidang komisi maupun saat duduk sebagai anggota *drafting committee.* Hasil sidang IPU tersebut, beberapa anggota delegasi DPR-RI telah terpilih untuk menduduki beberapa jabatan penting, yaitu *Vice President Executive Committee (Excom)* IPU yang dijabat oleh Ketua BKSAP, dan jabatan-jabatan lain yang dipegang oleh Anggota DPR RI yaitu Wakil Ketua *1st Standing Committee,* Anggota *Coordinating Committee of Women Parliamentarians,* Anggota *Committee of Middle-East Question*, Anggota tetap *Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law*. Di samping itu, terbuka peluang jabatan untuk Presiden IPU yang oleh beberapa negara termasuk Kelompok Regional Asia Pasifik dan grup *Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC)* memberikan dukungan penuh kepada Ketua DPR RI untuk mengisi lowongan ini, karena Presiden IPU yang sekarang H.E. Pier Ferdinando Cassini dari Italia, akan berakhir tugasnya Oktober yang akan datang.

Sidang Assembly IPU ke-118 dapat dikatakan telah menjadi capaian keberhasilan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dengan disahkannya resolusi *Emergency Item* mengenai Palestina dan adanya *time-frame* bagi pembahasan status keanggotaan *Palestine National Council* pada sidang *Governing Council* ke-183 bulan Oktober 2008. Selain itu, berbagai rujukan yang menjadi kepentingan negara-negara OKI, yang mencakup kebebasan individu, penghormatan hak asasi manusia, pelaksanaan demokrasi, dan perlindungan pekerja migran telah menjadi bagian dari resolusi yang dihasilkan oleh Sidang Assembly IPU ke-1 18.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada satu hal penting terkait dengan penegakan hukum yang telah melibatkan beberapa anggota Dewan. Empat anggota Dewan telah dijadikan tersangka, ditangkap dan ditahan oleh KPK baik berkaitan dengan kasus aliran dana BI, dugaan kasus korupsi pembelian alat pemadam kebakaran, maupun dugaan suap berkaitan dengan pengalihan fungsi lahan hutan lindung. Kalangan,Dewan prihatin dengan kasus-kasus ini semua. Namun demikian, kita bersikap untuk menyerahkan semua ini kepada proses hukum, dengan meminta semua pihak untuk tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Kepada Badan Kehormatan maupun Komisi III DPR RI diharapkan dapat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Pasal 85 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota DPR, DPD, MPR, dan DPRD, Badan Kehormatan DPR RI telah mengusulkan kepada Pimpinan Dewan, agar anggota Dewan yang telah ditahan selama 3 bulan perlu dilakukan proses Pergantian Antar Waktu karena bersangkutan dianggap tidak dapat menjalankan tugas sebagai anggota Dewan selama 3 bulan berturut-turut. Oleh karena itu, pimpinan partai-partai politik diminta untuk mempertimbangkan dan menindaklanjuti usulan ini. Berkaitan dengan itu semua, kepada Badan Kehormatan dan Badan LegisIasi diharapkan dapat segera menyelesaikan Tata Cara Beracara Badan Kehormatan dalam rangka menegakkan dan menjaga Kode Etik DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum kami menutup Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008 ini, perlu kami informasikan bahwa terhitung awal Mei 2008, masing-masing anggota Dewan telah difasilitasi dengan tenaga ahli sebagai kelengkapan lebih lanjut dari tersedianya tenaga-tenaga ahli baik di Alat Kelengkapan Dewan maupun di Fraksi-fraksi DPR RI. Pimpinan Dewan berharap kehadiran tenaga ahli ini, akan dapat memperkuat peran, tugas dan fungsi bagi peningkatan kinerja DPR sebagai lembaga negara dan lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan harapan rakyat.

Demikianlah hal-hal yang perlu kami sampaikan dan menjadi pokok-pokok kegiatan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2007-2008 yang menjadi perhatian Dewan dalam rangka pelaksanaan tiga fungsi Dewan. Selanjutnya, dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahi Robil'alamin*, izinkanlah Pimpinan Dewan menutup Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV hari ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan Taufiq dan HidayahNya kepada kita semua. Amin ya Robal' Alamin. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

H. R. AGUNG LAKSONO

Naskah ini telah diproses oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di
www.parlemen.net